

## 1998 Reform Movement

H. Agus Rustamana<sup>1\*</sup>, Putry Maharani Adillah<sup>2</sup>, Zamin Zatua<sup>3</sup>  
Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Corresponding Author:** H. Agus Rustamana [agus.rustamana@untirta.ac.id](mailto:agus.rustamana@untirta.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* 1998 Reform,  
Students, Society

*Received :* 02 October

*Revised :* 21 October

*Accepted:* 22 November

©2023 Rustamana, Adillah,  
Zatua: This is an open-access  
article distributed under the  
terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The 1998 reform movement was a social movement that was born from the demands of young intellectuals in the campus community. In historical records, the New Order student movement in Indonesia reached its peak in 1998, to demand reform of the New Order government with the removal of Soeharto from his position as president, and demands for improvements such as amendments to the 1945 Constitution, an end to the ongoing economic crisis, and other similar things. This movement carried out by students gained momentum when the monetary crisis occurred, prices of necessities soared, and people's purchasing power decreased. The demand to remove President Soeharto became a national agenda by the student movement who wanted reform and this of course received sympathy and support from the people. The aim of this research is to determine the occurrence of the 1998 reform movement and the role of pupils, students and society in facing the 1998 reform movement. The method used in this research uses a descriptive analysis method, namely research by collecting data according to the truth, then the data is compiled, processed and analyzed to be able to provide an overview of the existing problem, using several previous literature sources.

## Gerakan Reformasi 1998

H. Agus Rustamana<sup>1\*</sup>, Putry Maharani Adillah<sup>2</sup>, Zamin Zatus<sup>3</sup>

Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Corresponding Author:** H. Agus Rustamana [agus.rustamana@untirta.ac.id](mailto:agus.rustamana@untirta.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Reformasi 1998, Mahasiswa, Masyarakat

*Received :* 02 Oktober

*Revised :* 21 Oktober

*Accepted:* 22 November

©2023 Rustamana, Adillah, Zatus: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Gerakan reformasi 1998 adalah suatu gerakan sosial yang muncul dari tuntutan kaum intelektual muda masyarakat kampus. Berdasarkan catatan sejarah Orba gerakan mahasiswa di Indonesia mencapai puncak tahun 1998, guna menuntut reformasi didalam tatanan pemerintahan Orba dengan turunnya Soeharto dari jabatan sebagai presiden, maupun tuntutan perbaikan misalnya amandemen UUD 1945, menyelesaikan krisis ekonomi yang tengah terjadi, serta yang lainnya. Gerakan yang dilaksanakan Mahasiswa ini memperoleh momentum saat adanya krisis moneter, harga kebutuhan yang mengalami kenaikan tinggi, menurunnya daya beli masyarakat juga. Tuntutan guna menurunkan Presiden Soeharto merupakan suatu agenda nasional oleh gerakan mahasiswa yang menghendaki ada suatu reformasi dan hal tersebut tentu memperoleh dukungan maupun simpati melalui masyarakat. Penelitian ini tujuannya memahami terjadinya gerakan reformasi 1998 serta peran pelajar, mahasiswa dan masyarakat dalam menghadapi gerakan reformasi 1998. Adapun metode yang dipakai pada penelitian menggunakan metode analisis deskriptif yakni penelitian dengan melakukan pengumpulan data selaras dengan yang sesungguhnya lalu data itu dilakukan penyusunan, pengolahan, penganalisisan agar bisa memberi deskripsi terkait permasalahan yang terjadi, dengan menggunakan beberapa sumber literatur terdahulu.

---

## PENDAHULUAN

Tahun 1998 negara Indonesia terjadi suatu kejadian yang sangat penting mempunyai pengaruh besar untuk negara, kejadian yang mungkin sulit dilupakan oleh banyak individu. Reformasi 1998 adalah gerakan yang menginginkan terdapatnya sebuah perubahan ke arah lebih baik. Reformasi adalah bentuk meletusnya permasalahan yang sebelumnya sudah ada di Indonesia, yang sudah membuat banyak warga Indonesia menderita dengan beberapa permasalahan yang ada, dan reformasi ini yang menurut masyarakat di saat itu bisa memecahkan beberapa permasalahan yang sudah terjadi. Kerusuhan yang diduga asalnya melalui SARA, terkhusus berdasarkan hal agama yang warga Indonesia adalah mayoritas memiliki agama Islam, namun hal ini sangat tidak mungkin dikarenakan menang kerukunan antara umat beragama di Indonesia sangatlah luar biasa. Tentu kerusuhan muncul diakibatkan ada ketimpangan sosial. Rangkaian kerusuhan Reformasi yang dituntut banyak golongan warga Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari peranan penting semua pemuda terkhusus mahasiswa yang senantiasa menyuarakan guna ada pembaharuan pada sistem pemerintahan Indonesia yang waktu itu sudah dipegang presiden Soeharto selama tiga puluh dua tahun, gerakan mahasiswa Indonesia tahun 1998 merupakan puncak gerakan yang dilaksanakan golongan mahasiswa yang dapat dinyatakan suatu gerakan monumental sebab dinilai sukses memaksa presiden Soeharto guna turun dari jabatannya yaitu Presiden RI tanggal 21 Mei 1998.

Gerakan yang dilaksanakan Mahasiswa ini memperoleh momentum saat ada krisis moneter, harga kebutuhan mengalami kenaikan tinggi, menurunnya daya beli masyarakat. Tuntutan guna menurunkan Presiden Soeharto sebagai suatu agenda nasional oleh gerakan mahasiswa yang menghendaki ada suatu reformasi dan hal tersebut tentu memperoleh dukungan maupun simpati melalui masyarakat.

## TINJAUAN PUSTAKA

Agenda reformasi yang merupakan tuntutan para mahasiswa menyangkut sejumlah hal, misalnya mengadili Soeharto beserta kroninya, melakukan amandemen UUD RI Tahun 1945, melakukan penghapusan dwifungsi ABRI, melakukan otonomi daerah yang seluas mungkin, melakukan penegakan supremasi hukum juga memunculkan pemerintahan yang terbebas KKN. Bulan Mei 1998, Indonesia memperoleh pukulan berat diakibatkan krisis finansial yang terjadi di wilayah Asia Selatan, Timur dan Tenggara. Inflasi juga pengangguran yang meningkat, terlebih lagi perilaku korupsi pemerintah, memunculkan rasa tidak puas pada pemerintahan Orba. Bulan April 1998, saat Soeharto kembali terpilih sebagai Presiden Indonesia, sesudah masa bakti 1993–1998, mahasiswa melalui beberapa universitas di seluruh Indonesia melakukan unjuk rasa besar-besaran. Mereka menuntut melakukan kembali pemilu juga langkah efektif pemerintah dalam menangani krisis. Berdasarkan demonstrasi ini, mahasiswa mendapatkan kekerasan fisik dikarenakan dinilai akan memunculkan gangguan.

Asumsi terkait pemicu kerusuhan Mei 1998 yang paling terlihat salah satunya yaitu diakibatkan ada kejadian penembakan empat mahasiswa Trisakti

tanggal 12 Mei 1998, yakni satu hari sebelum ada kerusuhan itu. Asumsi tersebut bisa jadi benar, namun realitanya asumsi itu tidak bisa dipahami dengan sesederhana tersebut. Peristiwa kerusuhan Mei 1998 tidak dapat dipahami menjadi suatu kejadian yang terpisah dari serangkaian kejadian sebelumnya, bersama-sama dan yang terjadi sesudahnya. Hal tersebut karena kerusuhan Mei 1998 adalah perpaduan dari dinamika politik, ekonomi, sosial yang mencakup pertarungan beberapa kepentingan didalamnya. Kondisi ekonomi kian memburuk pula. Sejumlah kebijakan pemerintah kemudian sebagai beban berat yang harus dialami masyarakat.

## **METODOLOGI**

Metode yang digunakan penulis dalam meneliti gerakan reformasi 1988 yaitu mempergunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni melakukan analisa, deskripsi, peringkasan beberapa situasi, kondisi melalui sejumlah data yang terkumpulkan seperti hasil pengamatan atau wawancara terkait permasalahan yang dikaji yang ada dalam lapangan.

Jenis teknik analisa data deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mendayagunakan data kualitatif lalu diuraikan dengan cara deskriptif. Jenis analisa data deskriptif kualitatif seringkali dipakai dalam menganalisa gejala, peristiwa, atau kondisi secara sosial. Dan sebagai perpaduan dari teknik data deskriptif serta kualitatif.

Tentu dengan menggunakan teknik analisa data yang tepat sehingga akan bertambah banyaknya informasi yang bisa diurutkan lalu akan memudahkan kita agar memperoleh persepsi lebih jelas maupun mempunyai pemahaman lebih baik. Hal tersebut bisa menambah produktivitas yang lebih menghasilkan kesimpulan yang lebih kredibel.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Terjadinya Refromasi 1998**

Era pasca-Soeharto ataupun umum dengan dikenal Era reformasi diawali pada tahun 1998, yaitu ketika kejatuhannya soeharto dengan pengunduran dirinya pada 21 Mei 1998, yang kemudian digantikan B.J. Habibie selaku wakil presiden waktu itu. Beberapa isu saat periode ini antara lain dukungan dalam mengimplementasikan pemerintahan sipil dan demokrasi lebih kuat, elemen militer berupaya menjaga pengaruh, Islamisme yang muncul didalam masyarakat umum maupun politik, maupun lebih besarnya tuntutan otonomi daerah. Memberikan akibat, debat politik secara lebih terbuka dalam media massa juga ekspresi seni semakin mengalami peningkatan. Kejadian yang sudah membentuk Indonesia pada periode ini antara lain sekumpulan kejadian terorisme dan tsunami Samudra Hindia serta gempa bumi 2004. Masyarakat Indonesia yang tidak puas pada pemerintahan pimpinan Soeharto sekarang ini memunculkan demonstrasi yang sangat besar yang dilaksanakan beberapa gerakan mahasiswa dalam beberapa daerah di Indonesia.

Pemerintahan Soeharto bertambah disoroti sesudah Tragedi Trisakti tanggal 12 Mei 1998 dimana membuat empat mahasiswa mati tertembak lalu mengakibatkan Kerusuhan Mei 1998 satu hari sesudahnya. Gerakan mahasiswa

juga mengalami perluasan hamper seluruh Indonesia. Dibawah tekanan yang kuat melalui luar dan dalam negeri, Soeharto kemudian memilih melakukan pengunduran diri dari jabatan tanggal 21 Mei 1998. Krisis moneter yang dimulai Juli 1997, pada akhir tahun mengalami perubahan menjadi krisis finansial. Nilai tukar rupiah pada dolar yang melemah menjadikan harga mengalami kenaikan tinggi. Masyarakat kalangan bawah juga buruh merupakan bagian paling besar yang mengalami derita terparah diakibatkan krisis ini. Pegawai rendahan, pekerja perusahaan, buruh pabrik dan pedagang besar serta kecil terjadi goncangan psikologis sangat serius diakibatkan berhentinya kegiatan pada tempat bekerjanya maupun bisnis mereka. Semakin hari nasib mereka bertambah tak menentu. Banyak pabrik dan perusahaan melakukan pengurangan karyawan, dan pabrik juga tutup dikarenakan tekanan berat. PHK besar-besaran tidak bisa dicegah dalam perusahaan yang sebagian banyak material tergantung terhadap impor dari luar negeri. Bahan pokok kehidupan sehari-harinya yang dinamakan dengan sembako bertambah sulit ditemui. Susu, beras, terigu, minyak goreng juga bahan makanan yang lain tidak hanya harga naik, namun kerap sulit diperoleh dalam pasar. Tekanan ekonomi yang membebani sebagian banyak masyarakat di beberapa kota diperburuk dengan panel gagal tahun 1997 diakibatkan curah hujan yang menurun. Memberikan akibat penderitaan masyarakat bertambah meraa di desa maupun kota. Tanggapan pertama pemerintah pada krisis ini menunjukkan kesombongan atau minimnya kesadaran pada realita.

Reformasi diumumkan, tetapi proyek para keluarga juga keluarga senantiasa dilindungi. Perjanjian dengan IMF bulan Oktober 1997 memberikan akibat enam belas bank ditutup, namun 2 bank yang dipunyai keluarga Soeharto kembali dibuka. Kemudian, dimulai tarik urat diantara IMF dengan Soeharto yang menjadi konsumsi publik bertambah memperkuat pandangan para pengamat luar juga dalam negeri bahwasanya rezim ini telah sangat terbelit korupsi, nepotisme maupun inkompetensi. Saat pemerintah dianggap tidak bisa memulihkan perekonomian, kepercayaan masyarakat pada pemerintah maupun Soeharto menghilang juga. Fenomena berkurangnya kepercayaan pada pemerintah Soeharto sesungguhnya telah tercium sejak tahun menjelang krisis moneter. Kerusakan yang muncul pada beberapa kota, misalnya Tasikmalayan, Pekalongan, Banjarmasin, Situbondo, Rengasdengklok juga yang lain pada tahun sebelumnya serta menjelang pemilu bulan Mei 1997, adalah beberapa tanda menurunnya kepercayaan masyarakat pada pemerintahan maupun penguasa. Kerusakan tersebut adalah ekspresi gugatan masyarakat pada janji keadilan yang didengungkan saat tiap menjelang pemilu. Pemerintah senantiasa menjanjikan keadilan sosial ekonomi, namun yang dihadapinya merupakan ketimpangan sosial ekonomi. Penyimpangan masa Orba dilihat pula dalam upaya Soeharto untuk memerintah Indonesia. Demokratisasi di Indonesia di masa Orba masih belum dilaksanakan dengan utuh. Ditinjau berdasarkan tatanan pemerintah, penyelenggaraan demokrasi pancasila belum berlangsung secara resmi. Pemusatan kekuasaan tersebut mencakup bidang ekonomi, hukum, sosial budaya, dan politik.

## **B. Peran Pelajar Serta Mahasiswa dalam Gerakan Reformasi 1998**

Sejarah perkembangannya kelompok intelektual, terkhusus mahasiswa di Indonesia, bukan sebatas mengacu terhadap masalah akademis saja. Beberapa kejadian penting ikut menyertakan mahasiswa untuk aktor penggerak. Hal tersebut tentu ada sebabnya, (Lipset & Altbach, 1969) menyatakan bahwasanya mahasiswa mempunyai tendensi aktif dalam memberi respon pada trend politik dan terlibat untuk melaksanakan perubahan daripada populasi kebanyakan. Sesuai dengan hal itu Lewis Coser seperti dikutip (Budiman, 1978) menyatakan pula bahwasanya kelompok intelektual merupakan mereka yang tidak pernah merasa puas. Artinya mahasiswa mempunyai kecenderungan agar senantiasa mengejar kebenaran. Berdasarkan negara berkembang mahasiswa secara spesifik memiliki posisi juga peran yang penting karena mereka merupakan mahasiswa sebagai kelompok elit yang pertama kalinya dikenalkan dalam kelompok intelektual khususnya mahasiswa.

Dengan mempunyai sejumlah kelebihan dan kecenderungan daripada sebagian banyak masyarakat, mahasiswa kemudian ikut pada beberapa macam kegiatan dan gerakan politik. (Curran & Renzetti, 1990) menyatakan bahwasanya mahasiswa mempunyai sejarah yang panjang didalam dunia aktivisme menjadi kelompok penekan politik. Lipset selanjutnya dari Philip Burgess (Hofstetter, 1971) menyatakan pula bahwasanya ada sejumlah alasan mengapakah timbul pembangkangan oleh kelompok intelektual. Sebagian diantaranya adalah munculnya masalah institusional spesifik selayaknya masalah sosial politik yang luas misalnya rasisme domestik juga perang, maupun penyebab generasi contohnya pemanfaatan teknologi pada kelompok mahasiswa. Maka, Edward Shill dalam (Akbar, 2016) mengelompokkan mahasiswa ke dalam kelompok intelektual dengan kepemilikan karakteristik khas terhadap tanggung jawab sosial dan fungsinya, menyatakan ada beberapa peranan kaum intelektual antara lain ikut membangun dan menyediakan kerangka nasional antara bangsa, membina kebersamaan juga keberdayaan, menyebarkan nilai kebudayaan yang tinggi, memberikan pengaruh pada proses perubahan sosial, dan memainkan peranan politik.

Arbi Sanit dalam lima fungsi itu memiliki pandangan bahwasanya mahasiswa merupakan kaum intelektual lebih banyak ikut serta didalam 3 fungsi terakhir, terlebih lagi lewat beberapa aktivisme gerakan yang dilaksanakan (Sanit, 1981). Menindak lanjuti pendapat terdahulu, Arbi Sanit seperti dikutip (Sulistyo, 1998) menyatakan bahwasanya gerakan mahasiswa timbul dikarenakan ada perasaan kalut terhadap keadaan ekonomi maupun sosial yang ada, kesenjangan bertambah merupakan dampak keputusan maupun kebijakan pemerintah yang tidak adil maupun berpihak maka memunculkan ras atidak puas pada pelaksanaan negara, dan sistem politik yang memiliki kecenderungan non-demokratis. Adanya pandangan bahwasanya gerakan mahasiswa muncul dikarenakan desakan juga dorongan agar senantiasa berjuang untuk nasib masyarakat banyak (Ali, 1985), beberapa kelompok dan aliran mahasiswa yang lahir berdasarkan setiap ideologi gerakan seringkali terlibat melaksanakan aksi massa demonstrasi. Gerakan mahasiswa ini mencakup pula beberapa jenis ideologi dan nilai yang dipercayainya. Hal

tersebut ditunjukkan dengan adanya beberapa macam organisasi dan kelompok mahasiswa berlandaskan suatu nilai. Hal itu lalu menjadikan ada sejumlah perbedaan orientasi diantara berdasarkan hal tujuan dari gerakan tertentu. Meskipun (Lipset, 1968) menyatakan bahwasanya kajian masa awal reformasi memiliki kecenderungan lebih bervariasi dengan mengikutsertakan kelompok ataupun organisasi berbasis nasionalis dan agama, maupun yang cukup baru aksi dari gerakan mahasiswa dalam dekade ke-2 orde reformasi memiliki kecenderungan berkaitan dengan isu terbaru yaitu rasisme, gender, otonomi khusus, kebijakan pemerintah, dan yang lain oleh mahasiswa secara berkelompok berlandaskan afiliasi ideologi maupun politik. Tetapi, dengan mengacu beberapa afiliasi ideologi itu, gerakan mahasiswa lalu harus dilakukan peninjauan ulang berkaitan terhadap arah gerakan yang dilaksanakan.

(Sanit, 1999) memiliki pandangan bahwasanya gerakan mahasiswa mencakup 2 arah yaitu aksi politik dan moral. Berdasarkan arah gerakan dengan sifat moralis, sehingga gerakan mahasiswa ini meletakkan gerakan menjadi suatu kekuatan untuk motor dalam munculnya perubahan. Apalagi saat negara dengan birokrasi serta institusi politiknya tidak berhasil melaksanakan peranan yang tepat selaras dengan tuntutan dan kewajibannya. Sehingga, arah gerakan mahasiswa ini fokusnya guna meletakkan juga meluruskan lagi fungsi dan peranan lembaga yang ada. Karena bila keadaan itu tidak diperhatikan dan tidak ditindaklanjuti, sehingga penindasan pada masyarakat terjadi terus menerus maka keadilan maupun kesejahteraan tidak akan terwujud.

Gerakan mahasiswa tidak bisa hanya dipandang berdasarkan sudut pandang mahasiswa tersebut sendiri saja. Hal itu karena gerakan mahasiswa adalah penggabungan dari beberapa macam kelompok mahasiswa yang bergabung dalam menuntut suatu hal. Oleh sebabnya, teori gerakan sosial dipakai peneliti untuk pisau analisis dalam melakukan pengkajian gerakan mahasiswa melalui masing-masing masa di Indonesia. Gerakan sosial secara definitif bisa diartikan sebagai usaha dengan tindakan yang diinginkan sekumpulan individu tujuannya mewujudkan suatu perubahan (Sukmana, 2016). Setiadi dan Kolip (2013) menyatakan bahwasanya memobilisasi dan menggerakkan dirinya sendiri. Gerakan sosial dimana mahasiswa cukup dinyatakan sebagai aktor gerakan yang cukup kuat adalah gerakan sosial yang dilaksanakan tahun 1974 berakhir Tragedi Malapetaka 15 Januari (Malari 1974). Adanya kejadian Malari dimana mahasiswa banyak turut serta didalam pergerakan ini mengingatkan penulis terhadap paradigma dasar misalnya teori gerakan sosial klasik yaitu Relative Deprivation Theory. Berdasarkan teori ini, tokoh psikologi misalnya, James Davis, Denton E. Morrison, Ted Robert Gurr memberi deskripsi bahwasanya sikap masyarakat yang agresif timbul menjadi pengimplikasian akan terdapatnya frustrasi didalam masyarakat (Aribowo, 2020). Frustrasi itu dikarenakan masyarakat terjadi sebuah kesenjangan diantara nilai yang diinginkan dengan nilai kapabilitas. Hal itu sesuai dengan deskripsi karena adanya gerakan dari mahasiswa yang berakhir kepada Tragedi Malari yang akan dideskripsikan dengan singkat. Berkisar tahun 1967-an, atas warisan era Orla dimana pertumbuhan ekonomi yang tidak terjadi peningkatan dan memiliki kecenderungan mengalami penurunan, pemerintah Orba lalu gencar

melaksanakan beberapa langkah dengan membuat kebijakan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan pertumbuhan perekonomian walaupun beberapa kebijakan itu bercorak kapitalistik. Kebijakan yang diimplementasikan salah satunya merupakan kebijakan PMA dengan tujuan menarik pemodal asing untuk mencapai perkembangan perekonomian yang tinggi. Kebijakan PMA ini selanjutnya memunculkan eksploitasi yang sangat besar terhadap SDA oleh perusahaan asing terkhusus yang terbanyak merupakan perusahaan yang asalnya melalui Jepang. Memang benar, dikarenakan adanya kebijakan itu, GDP nasional mengalami kenaikan signifikan sebanyak empat puluh dua persen maka merangsang pertumbuhan melebihi tujuh persen. Sehingga atas hal tersebut, pemerintah sudah merasa melewati jalan yang tepat pada beberapa keputusan yang ditentukan. Tetapi, pada pihak lainnya, terkhusus mahasiswa merasakan usaha perbaikan dengan hasil yaitu perkembangan perekonomian yang cukup besar itu hanya semu belaka dikarenakan bertambah lebarnya kesenjangan didalam masyarakat.

Korupsi yang semakin banyak ditunjang dengan abuse of power melalui birokrat pemerintahan untuk bertindak kolusi dengan masif juga. Bertambah terlihatnya kemiskinan, terlebih lagi didukung dengan represifitas negara maka selanjutnya memunculkan kekecewaan dan frustrasi melalui kalangan mahasiswa. Kesenjangan, ketidakadilan, penderitaan masyarakat, manipulasi kian dirasakan. Maka beberapa hal itu terakumulasikan dalam peristiwa Malari 1974. Tragedi Malapetaka 15 Januari 1974 yaitu puncak kekecewaannya mahasiswa pada kebijakan ekonomi juga politik rezim Soeharto yang dianggap bukan sekedar kian meningkatkan penderitaan masyarakat namun pula menunjukkan represifitas dengan arogansi maupun otoritarianisme pemerintah (Usman, 1999). Terhadap kekecewaan itu dan ditunjang dengan momentum kehadirannya Tanaka sebagai PM Jepang menjadi simbol utama adanya kesenjangan secara sosial yang diakibatkan oleh investor asing, sehingga tindak agresif anggota gerakan pun muncul. Kerusuhan seperti halnya membakar mobil, toko, maupun kekerasan lainnya membuktikan bahwasanya asumsi mendasar teori deprivasi relative telah dibuktikan. Rasa frustrasi diakibatkan kesenjangan itu kemudian menimbulkan tindakan pemberontakan daripada peserta gerakan sebagai bagiannya masyarakat melalui harapan hak untuk kesejahteraan bisa didapatkan lagi. Kondisi tersebut sesuai pula bahwasanya deprivasi relatif bukan sebatas terhadap masalah keinginan serta tujuan yang berupa didapatkan, tetapi berhubungan dengan tujuan yang berdasarkan seseorang adalah hak yang layak didapatkan dan mesti kembali dipenuhi (Aribowo, 2020).

Kemudian, gerakan lainnya yang cukup diingat dalam catatan pergerakan Indonesia yakni Gerakan Reformasi 1998 yang seringkali masih mahasiswa kenang sampai sekarang. Gerakan itu bila dianalisa timbul pula diakibatkan adanya kekecewaan masyarakat diakibatkan kesewenangan rezim Orba. Kurangnya kepercayaan juga ketidakpuasan mahasiswa merupakan akibat dari bertambah tidak terjamin kesejahteraan rakyat Gerakan Reformasi 1998 ini muncul dengan kondisi berbondong-bondong beberapa anggota masyarakat terkhusus kalangan menengah yang banyak diwakilkan mahasiswa



di Senayan, yakni pada gedung perwakilan melalui tuntutan dalam rezim Orba yang bisa dinyatakan rezim yang cukup berkuasa untuk menerjemahkan kekuasaan.

### **Gerakan Mahasiswa di Berbagai Orde :**

#### **1. Gerakan Mahasiswa di Masa Orde Lama**

Kekuasaan dari rezim orde lama telah berlangsung hingga dua puluh tahun diawali tahun 1945 sampai 1965. Mengacu dari masa orde ini, setidaknya pemerintahan telah berlangsung pada dua babak, yaitu masa demokrasi parlementer beserta masa demokrasi terpimpin. Saat diselidiki, babak awal dari perjalanannya rezim orde lama diawali oleh kondisi dimana politik, sosial, ekonomi, geopolitik cukup stabil dikarenakan euphoria maupun narasi kemerdekaan masih dirasakan dan kelompok pemuda mempunyai peranan krusial pula berdasarkan hal melaksanakan kegiatan yang mengarah menuju kemerdekaan. Selanjutnya, era dari orde lama ini berganti ke dalam masa pemerintahan yang mengimplementasikan demokrasi parlementer, dimana gejolak politik pada masa ini memenuhi situasi negeri. Gejolak itu timbul menjadi implikasi dari pergantiannya kabinet yang tidak berkesudahan, diawali dengan satu partai ke partai lainnya. Maka atas hal tersebut, Soekarno selanjutnya menerbitkan dekret untuk melegalkan dimulainya masa demokrasi terpimpin di waktu itu. Berdasarkan babak ini, yaitu masa demokrasi terpimpin tersebut lalu lahirlah kelompok mahasiswa, terkhusus yang kontra terhadap Soekarno. Kelompok itu mulai membentuk kekuatan untuk menyuarakan aspirasinya mengenai kekalutan. Sejumlah organisasi berbasis ideologi kiri yang lain ikut pula berdiri, misalnya GAMSOS, suatu organisasi mahasiswa yang merepresentasi ideologi sosialisime. Organisasi dengan haluan ideologi komunis ikut juga dibentuk, yaitu CGMNI, yang berdasarkan perkembangan memiliki hubungan kuat dengan Partai Komunis Indonesia. Maka, dari awal perkembangan orde ini, organisasi yang umum berkembang dalam lingkup kampus cenderung diilhami dengan pandangan ideologi dengan nilai yang terdapat di waktu itu. Adanya sarana organisasi berbentuk ekstra membuat mahasiswa selalu berkumpul dalam meningkatkan nilai yang dianut.

Pertentangan antara mahasiswa yang diusung oleh mahasiswa guna melakukan penekanan pengaruh kelompok komunis, PKI dan pihak pro Soekarno. Ditunjang dengan sejumlah pihak misalnya berbagai elemen pemerintahan, tentara (AD), politisi sosialis maupun pemuda ansoor juga menunjang gerakannya mahasiswa, dimana gerakan tersebut melawan dengan upaya dalam memberi tekanan pada pemerintahannya Soekarno di waktu itu melalui menyuarakan Tritura. Gerakan mahasiswa yang dilaksanakan dalam babak ini disebut angkatan'66.

Sejumlah tokoh ternama yang bergabung pada angkatan 66 yaitu David Napitupulu Cosmas Batubara, Abdul Ghofur, Zamroni, yang selanjutnya sebagai pelopor pergerakan beberapa demonstrasi yang memberikan tentangan untuk pemerintah sampai kemudian Presiden Soekarno bertemu di Istana Negara terhadap mahasiswa. Kemudian di istana pula mahasiswa melalui Presiden serta KAMI tidak mendapatkan titik temu namun mahasiswa menolak pulang sebelum pembubaran PKI. Soeharto selanjutnya keluar lalu menemui

mahasiswa serta menyatakan pembubarannya PKI serta tanggal 25 Februari 1966 resmi dilaksanakan pembubaran untuk KAMI. Aktivitas KAMI selanjutnya mendapatkan jabatan di Orba sebab sudah membantu Presiden Soeharto dalam memberangus pengaruh Komunisme maupun meruntuhkan Orla.

## 2. Gerakan Mahasiswa di Masa Orde Baru

Mahasiswa dalam masa Orba berkaitan secara kuat terhadap tradisi politik dari oposisi semenjak tahun 1970-an awal. Mahasiswa dalam masa ini mengorganisasikan diri dengan berkelompok tujuannya untuk memperlancar protes pada pemerintahan presiden Soeharto dalam beberapa sektor juga bermacam isu misalnya masalah mengenai korupsi penyelenggara negara. Tidak adilnya pemilu 1971 dikarenakan ada beberapa hal curang yang sudah terorganisir, dan isu mengenai pemborosan terhadap uang dari negara lewat beberapa proyek misalnya Taman Hiburan yaitu TMI. Terhadap dasar itu, beberapa pengawalan melalui tindakan protes mahasiswa lancarkan dalam masa Orba dengan bergelombang antar tahun. Walaupun sesungguhnya kekuatan dari mahasiswa di masa tersebut dianggap lemah sekali dan sangat tidak sesuai terhadap pemerintahannya Soeharto yang sangat kuat di era tersebut. Tetapi, berdasarkan perkembangan berikutnya, mahasiswa sukses melakukan pengusuran rezim Orba tahun 1998. Gejala yang muncul pada waktu itu yakni rezim Orba yang mana sebagai kekuatan besar dan sebagai rezim yang mempunyai persiapan cukup cermat dalam melakukan penekanan kritik lalu mahasiswa tidak mau melakukan kritik ataupun hinaan secara eksplisit dan berupaya dalam memberikan kritik rezim dengan memberi koreksi maupun peringatan pada pemimpin. Hal itu selanjutnya sebagai dasar daripada Arif Budiman 1970-an guna menginisiasi Mahasiswa Menggugat dimana peranan mahasiswa disini yaitu mempunyai tanggung jawab dalam mengkoreksi pemerintah jika langkahnya yang tidak pro masyarakat juga belum mempunyai perencanaan guna bersekongkol pada kekuatan lainnya guna menggulingkan pemerintahan di waktu itu.

Arif Budiman menciptakans eruan pula dengan kampanye golput dan juga menginisiasi beberapa gerakan dalam memberantas kejahatan moral yang lain yang muncul selama pemerintahan orba berkuasa. Namun gerakan yang diserukan ini, berdasarkan realita hanya sebatas kampanye dan tidak sampai terhadap tindakan guna mobilisasi massa yang sangat masif maka dapat memberi tekanan kepada pemerintahan. Pergerakan mahasiswa di zaman Orba mempunyai pula perbedaan pada pola mahasiswa saat orde lama. Jika pada saat zaman Orde Lama para mahasiswa umumnya lebih dekat dengan kekuatan militer berdasarkan hal ini merupakan AD dalam melaksanakan pergerakan namun justru di zaman Presiden Soeharto mahasiswa justru sangat jauh dengan militer juga tidak mempunyai hubungan yang positif untuk melaksanakan pergerakan diantara mahasiswa dengan militer hal itu lalu memunculkan gap diantara visi Presiden Soeharto yang mempercayai bahwasanya stabilitas politik harus dimunculkan dengan beberapa cara misalnya dengan melakukan penekanan suara sumbang yang terdapat pada mahasiswa maka kritis terus

diberikan namun pada sisi lainnya Presiden Soeharto percaya guna menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional yang diyakininya.

### 3. Gerakan Mahasiswa di Masa Reformasi

Menjelang era Presiden Soeharto yang berakhir mahasiswa yang mengadakan prots selanjutnya bertambah besar dan masiff baik secara ruang lingkup dan proporsi. Yang dimaksud merupakan mahasiswa yang umumnya hanya berdemonstrasi di Bandung maupun Jakarta, gerakan mahasiswa sesudah itu lalu mengalami perluasan menjadi mengalami penyebaran di beberapa kota yang lain misalnya Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Bogor, Bali serta Mataram terkhusus di era 1990-an. Proses yang semakin mengalami peningkatan dikarenakan mahasiswa tidak dapat terus menerus bersembunyi atau pemerintah intimidasi melalui kebijakan yang berupaya menekan suaranya mahasiswa. Beberapa kasus HAM dalam akhir era jabatannya Soeharto banyak terjadi pemberedelan yang pemerintah laksanakan pada kantor berita, menjadikan mahasiswa mempunyai orientasi yang kuat dalam menjunjung keadilan selaras terhadap teori gerakan sosial dengan pandangan baru, yang mana Gerakan sosial baru memiliki hubungan terhadap orientasi gerakan yang ikut berjuang didalam isu baru, misalnya: persamaan dan keadilan hak, lingkungan hidup, human rights, perdamaian, gender, serta yang lainnya.

Selanjutnya beberapa fenomena misalnya batasan politik mahasiswa maupun penculikan misterius mahasiswa yang dilaksanakan pemerintahan selanjutnya memunculkan rasa tidak puas, maka tergerak untuk melaksanakan upaya kolektif (Klandermans, 2005) Setelah kejadian reformasi meledak, kelompok warga sipil dan organisasi akar rumput misalnya LSM akses tidak dibatasi kembali oleh pemerintah ataupun birokrasi politik maka selanjutnya seringkali mengungkapkan suatu hal pada pemerintahan. Adanya situasi peningkatan pembaharuan teknologi dan juga timbulnya pergeseran nilai didalam masyarakat, misal muncul pengakuan kelompok minoritas maupun isu terbarukan yang lain. Hal tersebut selanjutnya selaras terhadap faktor yang diungkapkan pada teori gerakan yakni faktor neutral, dimana faktor ini termasuk dalam penyebab terdapatnya suatu perubahan sosial dengan keseluruhan. Berdasarkan orde reformasi ini, semuanya memiliki hak dalam mengungkapkan aspirasi mereka juga dalam hal ini mahasiswa dianggap sudah mempunyai kekuaran yang berkurang dalam menyuarakan suatu hal pada pemerintah setelah reformasi. Hal itu karena normalisasi dalam keseharian kampus sesudah permusuhan yang sangat lama pada pemerintah yang menjadikan mahasiswa tidak mempunyai cita-cita guna menjadi oposisi, hanya kedudukan universal yang mungkin sesuai pemaparan Samuel Huntington dalam (Sebastian, 2014) masih tetap diberlakukan dalam era setelah reformasi.

### C. Peran Tokoh Masyarakat dalam Menghadapi Gerakan Reformasi 1998

Indonesia mengakui demokrasi menjadi suatu sistem ideal untuk melaksanakan praktik kenegaraan. Sesuai pemaparan Friederich A.Hayek, demokrasi adalah alat guna mewujudkan tujuan dan juga suatu sistem dalam memberi kemerdekaan individual dan perlindungan internal (Mufti, 2013).

Berdasarkan konteks Indonesia di masa Orba, demokrasi yang dilaksanakan merupakan prinsip demokrasi Pancasila. Tetapi berdasarkan pelaksanaan Pancasila diberikan tafsir tunggal oleh pemerintah serta lebih sering dipergunakan dalam melakukan penegakan stabilitas nasional. Kemudian untuk mempertahankan stabilitas nasional, masyarakat dibatasi guna terlibat dalam partai politik, namun cenderung lebih diarahkan menuju Golkar. Gerakan reformasi yang ada di tahun 1998 bisa dikelompokkan menjadi suatu gerakan sosial. Gerakan sosial adalah aksi kolektif yang dilaksanakan sekumpulan individu untuk memperjuangkan kepentingan yang berhubungan terhadap isu politik di dalam masyarakat (Sukmana, 2016).

Beberapa tokoh masyarakat pada perubahan ketatanegaraan serta politik Indonesia dalam masa Reformasi diantaranya:

a. Abdurrahman Wahid (Gusdur)

Abdurrahman Wahid / Gus Dur, merupakan pemimpin NU, suatu organisasi masyarakat Islam paling besar di Indonesia. Gus Dur mempunyai karisma kuat. Disamping ulama, Gus Dur juga negarawan yang mempunyai pengetahuan terkait betapa penting pluralsime bangsa. Gus Dur termasuk sebagai tokoh reformasi yang memberikan pengaruh besar bagi tanah air. Beliau adalah pencetus pertemuan Ciganjur yang dihadiri Sir Sultan Hamengkubuwono, Megawati, dan Amien Rais. Kemudian, tokoh reformasi yang hadir di Ciganjur menyebut dirinya kelompok Poros Tengah yang memiliki tekad meruntuhkan agenda reformasi di Indonesia. Selain itu, Gus Dur merupakan penggagas pula Partai Kebangkitan Bangsa dengan anggota mayoritas merupakan warga NU. Gus Dur pada partai ini jabatannya adalah Ketua Dewan Penasihat, sementara Matori Abdul Jalil sebagai ketua umum partai. Melalui partai ini juga banyak membentuk beberapa tokoh reformasi yang memiliki pemikiran yang kritis. Tokoh reformasi PKB serta Kelompok Poros Tengah mendukung penuh Gus Dur untuk menjadi calon presiden berdasarkan masa pemilu pertama awal order reformasi. Kemudian, Gus Dur dipilih menjadi Presiden RI menggantikan presiden ketiga, sementara Megawati dipilih sebagai wakil presiden. Tetapi MPR mencopot mandat dari Gus Dur ini di tengah masa pemerintahannya. Gus Dur wafat tanggal 30 Desember 2009 serta pemakaman beliau dilakukan di Jombang. Beberapa tokoh reformasi ikut mengantarkannya sampai tempat pemakaman.

b. Sri Sultan Hamengkubuwono X

Ini adalah sosok Raja Yogyakarta yang mempunyai peranan krusial dalam persatuan bangsa Indonesia, sebab terjadi ancaman disintegrasi semenjak krisis moneter Indonesia. Terlebih lagi, semenjak terlepasnya Timor Timur dari Negara Indonesia, memunculkan separatisme di sejumlah wilayah. Tidak sedikit yang tidak mengetahui, bahwasanya beliau termasuk tokoh reformasi. Sri Sultan, semasa menjelang reformasi seringkali turun ke jalan menenangkan demonstran supaya tidak berbuat anarkis, terkhusus di Yogyakarta. Beberapa hari menjelang turunnya Soeharto, terdapat beberapa aksi huru-hara di Solo, Jakarta, dan Banjarmasin. Beliau dalam hal ini merupakan tokoh reformasi, beliau memberikan pengaruh positif untuk warga Yogyakarta. Supaya aksi anarkis tidak merambat ke Yogyakarta,

beliau senantiasa hadir tiap adanya demonstrasi dan korban kekerasan demo juga dikunjungi. Ini bisa dibuktikan bahwa Yogyakarta masih terkontrol meskipun sempat adanya bentrok di sudut kota misalnya di Gejayan, dengan 1 korban jiwa. Namun tetap, tidak separah wilayah lainnya. Sehingga Sri Sultan juga merupakan tokoh yang bergabung dalam tokoh reformasi, dan lebih memiliki peran menjadi pengendali massa. Karena hal tersebut, sesudah reformasi, Sri Sultan dipilih menjabat Gubernur DIY bersama Sri Paku Alam IX.

c. Megawati Soekarno Putri

Kaitannya dengan hal ini Megawati adalah simbol perlawanan pada rezim orde baru. Ketika jabatan ketua PDI diturunkan satu pihak oleh Soeryadi dan didukung rezim Orba, Megawati membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, merupakan partai tandingan PDI. Megawati semenjak waktu tersebut memiliki jarak dengan rezim Soeharto. Sehingga, pemeran dalam tokoh reformasi ini mempunyai peranan cukup krusial. Beliau menyusun nilai demokrasi dan nasionalisme kembali. Kemudian partai yang dibangun Megawati mendapat banyak suara, dan Golkar terkalahkan. Megawati juga dipilih menjadi wakil presiden. Terdapat banyak tokoh reformasi yang lain yang mendukungnya. Dua tahun selanjutnya, Megawati naik sebagai presiden, lalu wakil presiden yang terpilih mendampingi adalah Hamzah Haz.

d. Baharuddin Jusuf Habibie (B J Habibie)

Beliau sukses menghentikan secara nyaris sempurna dan cepat kerusakan parah perekonomian yang dialami bangsa Indonesia. Ketika krisis sangat bergejolak dengan tekanan ekonomi yang sangat berat, secara cepat khas BJ Habibie, beliau berhasil menurunkan mata uang Indonesia yang waktu itu meleleh tidak memiliki daya pada USD di titik enam belas ribu menjadi kira-kira delapan ribu. Suatu prestasi yang hingga sekarang ini tidak dapat diwujudkan pemerintahan selanjutnya. Berdasarkan titik itu, BJ Habibie berhasil mengembalikan kepercayaan diri bangsa kembali. BJ Habibie yang memperkenalkan pula kebebasan pers pada sistem demokrasi kita. BH Habibie ini yang meletakkan dasar sendi demokrasi bangsa ini. Kebebasan pers yang kita rasakan sekarang ini yaitu tidak bisa lepas dari perasanan besar BJ Habibie. Di titik akhir beberapa hari ini BJ Habibie memperlihatkan kembali sikap negarawan dengan tidak memberi dukungan terbuka pada salah satu capresnya, walaupun selaku tokoh besar BJ Habibie tetap memberi pengarahan pada bangsa, siapakah tokoh yang sebaiknya ditunjuk menjadi pemimpin Indonesia.

e. Muhammad Amien Rais

Amien Rais merupakan tokoh kunci utama reformasi Indonesia. Ketika bangsa ini, waktu itu betul-betul tenggelam didalam keputusan pada massifnya praktek KKN zaman Orba, Amien Rais merupakan energi bangsa waktu itu guna menjadikan kita tetap semangat melawan praktik KKN. Amien Rais merupakan seseorang yang tepat, di waktu tepat serta memimpin bangsa ini mempergunakan cara tepat maka kita dapat melalui fase genting keruntuhan ORBA mengalami pergantian ke pemerintahan

transisi. Amien Rais berhasil pula menghantarkan proses reformasi yang dipimpinnya dan tidak ada pertumpahan darah. Masyarakat Indonesia menunggu dengan rasa cemas, sikap kenegarawan Amien Rais pada hasil akhir pemilu presiden 2014. Apakah Amien rais membuktikan kembali sikap kenegarawanan dengan pengaruh yang dimiliki, guna menjadikan pilpres ini berakhir damai bila hasil taidak memberikan keuntungan. Kelompoknya tersebut harapan semua bangsa Indonesia.

f. Akbar Tandjung

Akbar Tandjung memiliki peran besar untuk melakukan pembangunan sistem administrasi politik Indonesia waktu itu secara manajem pengelolaan yang sangat primitif. Akbar Tandjung sangat mungkin dipanggil sebagai Bapak Partai Modern Indonesia. Ketika berlangsung reformasi sehingga seluruh kemarahan dipancarkan pada Golkar. Seluruh individu menginginkan Golkar ditutup. Hanya sebenarnya Golkar tersebut infrastruktur politik modern milik bangsa Indonesia sebagai aset bangsa. Akbar Tandjung yang memiliki peranan besar mereformasikan parta Golkar yang awalnya hampir dibubarkan menjadi partai dengan sistem administrasi, jenjang pengkaderan yang sangat modern di Indonesia. Ke depannya berdasarkan hal pengelolaan, parpol di Indonesia harus memandang Golkar untuk referensi. Sekarang ini juga Akbar Tandjung membuktikan bahwasanya berpolitik dalam pilpres tersebut tidak harus berakhir dengan permusuhan. Akbar Tandjung membuktikan kepada masyarakat Indonesia menang maupun kalah dalam politik merupakan biasa, dengan mengunjungi seterusnya Jusuf Kalla guna melakukan silaturahmi di markas Jusuf Kalla.

g. Adi Sasono

Adi Sasono adalah salah satu tokoh kunci reformasi melawan KKN jaman orde baru. Sesudah proses alih transisi pemerintahan selesai, Adi Sasono yang merupakan Menteri Koperasi waktu itu segera kebut dengan program pemberdayaan UKM. Simpul sektor perekonomian masyarakat ia gerakan. Adi Sasono berfokus menciptakan sistem ekonomi mandiri yang tidak bergantung terhadap kekuatan asing. Akibat kebijakan yang sangat nasionalis ini sehingga oleh majalah Asiaweek dan Far Eastern Economic Review dicap dengan "the most dangerous man" dari Asia. Sebab kebijakan ekonomi Adi Sasono sangat memberikan kerugian kepentingan pemodal asing. Adi Sasono tercatat menjadi salah satu yang menyadarkan kita terkait krusialnya pembangunan ekonomi nasional yang mandiri.

h. Nurcholis Madjid (Cak Nur)

Cak Nur memiliki peranan penting sebagai penasehat Pak Harto di saat genting-gentingnya. Cak Nur yang pro reformasi namun karena pribadinya yang humanis juga terhormat sebagai kepercayaan Pak Harto dalam mengambil keputusan menyikapi gerakan masyarakat anti Soeharto. Adanya saran Cak Nur ini kemudian Pak Harto siap megundurkan diri dengan cara elegan tanpa ada perumpahan darah. Jadilah alih pemerintahan yang menandakan berakhirnya era ORBA berlangsung damai. Sampai akhir hayatnya Cak Nur dikenal dengan pemikiran humanisnya terkait Islam. Cak

Nur sebagaimana pula Gus Dur terkenal menjadi tokoh yang menghormati kebhinekaan bangsa Indonesia.

i. Wiranto

Wiranto merupakan seseorang yang memiliki jasa besar untuk bangsa Indonesia yang bersedia menjunjung tinggi kepentingan bangsa kala Indonesia sedang chaos setelah kerusuhan besar dalam era reformasi. Wiranto waktu itu diberikan mandat oleh Pak Harto untuk membangun Junta Militer dibawah kepemimpinannya. Hanya Wiranto cukup mampu membaca keinginan bangsa Indonesia. Meskipun Wiranto saat itu punya kekuasaan nyaris mutlak namun Wiranto memutuskan guna patuh terhadap keinginan rakyat dengan membiarkan reformasi berlangsung secara damai. Wiranto memilih lebih tunduk pada konstitusi. Saat ini Wiranto berjuang dengan Jokowi-JK agar terlibat kembali untuk melakukan pembangunan pemerintahan. Semoga nanti bila kembali di kekuasaan dalam kesempatan kedua kalinya, Wiranto bisa memberikan dedikasi terbaiknya.

j. Harmoko

Menjelang Pemilu 1998, Soeharto sebenarnya sudah berniat mundur. Dia bertanya apakah rakyat masih menginginkan dia jadi presiden, jika tidak Soeharto siap lengser keprabon. Nah, Harmoko merupakan salah satu orang yang mengusulkan agar Soeharto kembali menjabat sebagai presiden bagi periode 1998-2003 sebelum melaksanakan Sidang Istimewa MPR. Harmoko berupaya meyakinkannya dengan memberi data bahwasanya masyarakat masih menginginkan sebagai presiden dan tidak terdapat calon lainnya yang layak menduduki posisi tersebut. Dikarenakan pemaparan Harmoko, Soeharto bersedia dicalonkan kembali.

Berdasarkan rencana, sidang yang dilakukan tanggal 10 Maret 1998, selaku Ketua MPR, Harmoko sukses mengontrol Sidang Umum MPR dalam melakukan perpanjangan masa kepresidenan Soeharto satu kali lagi. "Mencalonkan Bapak haji Muhammad Soeharto menjadi Presiden RI kembali," ucap Harmoko ketika membaca keputusan persidangan. Diiringi gemuruh tepuk tangan peserta sidang umum MPR. Tepuk tangan semu tersebut tidak lama. Demonstrasi yang sangat besar yang dilaksanakan masyarakat maupun mahasiswa mendesak Soeharto turun dari jabatan. Aksi demo selanjutnya disertai tragedi kerusuhan Mei 1998 yang penuh air mata maupun darah. Masa menduduki juga mengepung Gedung MPR/DPR selama berminggu-minggu. Dan tidak diduga, pada hitungan di bawah 3 bulan ataupun tanggal 18 Mei 1998, Harmoko menerbitkan keterangan pers lalu meminta supaya Soeharto mengundurkan diri untuk kepentingan nasional. "Pimpinan Dewan baik ketua dan wakil ketua menginginkan untuk persatuan juga kesatuan bangsa, supaya Presiden secara bijaksana serta arif sebaiknya melakukan pengunduran diri," ucap Harmoko saat itu. Banyak yang menduka, ucapan tersebut dikeluarkan sebab Harmoko merasakan ketakutan. Rumah keluarga Harmoko di Solong memang telah dibakar massa. Apakah situasi tersebut menjadikan Harmoko memilih guna balik badan lalu melawan seseorang yang sudah membesarkan namanya? Ataulah Harmoko mengetahui akhir Soeharto dan Orba telah dekat.

Tanggal 19 Mei, Soeharto bertemu dengan 9 pemimpin Islam terkemuka, salah satunya Nurcholis Wahid beserta Abdurrahman Wahid, tetapi tidak menyertakan Amien Rais. Soeharto meminta opini mereka apakah ia memang sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya. Soeharto mundur tanggal 21 Mei 1998. Keluarga Cendana menilai Harmoko seseorang yang paling berdosa terkait lengsernya Soeharto. Keduanya tidak pernah bertemu, sampai kemudian tanggal 16 Januari 2008, Harmoko menjenguk Soeharto yang sedang sakit di RSPP Jakarta. Sesudah sepuluh tahun baru Harmoko beranibertemu dengan bosnya.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **A. Kesimpulan**

Agenda reformasi yang merupakan tuntutan para mahasiswa menyangkut sejumlah hal, misalnya mengadili Soeharto beserta kroninya, menjalankan amandemen UUD RI 1945, melakukan penghapusan dwifungsi ABRI, melakukan otonomi daerah yang seluas mungkin, melakukan penegakan supremasi hukum, juga memunculkan pemerintgahan yang bersih dari KKN. Bulan Mei 1998, Indonesia menerima pukulan tajam diakibatkan krisis ekonomi yang menerjang wilayah Asia Selatan, Timur, Tenggara. Inflasi maupun pengangguran yang meningkat, terlebih lagi tindakan korupsi pemerintah, memunculkan rasa tidak puas pada pemerintahan Orba. Bulan April 1998, saat Soeharto dipilih kembali sebagai Presiden Indonesia, sesudah masa bakti 1993-1998, mahasiswa melalui beberapa universitas di seluruh Indonesia melaksanakan unjuk rasa dengan sebesar-besarnya. Mereka menginginkan pemilu diadakan lagi dan upaya efektif pemerintah dalam menangani krisis. Pada demonstrasi ini, mahasiswa mendapatkan kekerasan fisik sebab dinilai akan memunculkan gangguan.

Pemerintahan Soeharto bertambah disorot sesudah Tragedi Trisakti tanggal 12 Mei 1998 menyebabkan 4 mahasiswa tertembak mati lalu memunculkan Kerusuhan Mei 1998 satu hari sesudahnya. Gerakan mahasiswa juga mengalami perluasan hampir di seluruh Indonesia. Dibawah tekanan yang besar melalui luar dan dalam negeri, Soeharto lalu memilih melakukan pengunduran diri dari jabatan tanggal 21 Mei 1998. Krisis moneter yang terjadi bulan Juli 1997, pada akhir tahun berubah menjadi krisis finansial. Nilai tukar rupiah yang melemah pada dolar menjadikan harga naik tinggi. Buruk dan masyarakat kecil merupakan bagian paling besar yang menanggung derita terparah diakibatkan krisis ini. Buruh pabrik, pegawai rendah, pedagang besar serta kecil, pekerja perusahaan terjadi gonjangan psikologis sangat serius diakibatkan berhentinya kegiatan di tempat bekerja maupun bisnis mereka. Semakin hari nasibnya bertambah tidak tentu. Banyak pabrik juga perusahaan yang melakukan pengurangan karyawan, serta pabrik juga tutup dikarenakan tekanan berat. PHK besar-besaran tidak bisa dihindari di perusahaan yang sebagian banyak material tergantung terhadap impor dari luar negeri. Bahan pokok kebutuhan hidup keseharian yang dikenal sebagai sembako bertambah sulit ditemui. Susu, beras, terigu, minyak goreng juga bahan makanan yang lain tidak hanya harga naik, namun kerap sulit diperoleh dalam pasar. Tekanan ekonomi yang membebani sebagian banyak masyarakat di beberapa kota



diperburuk dengan panel gagal tahun 1997 diakibatkan curah hujan yang menurun. Memberikan akibat penderitaan masyarakat bertambah meraa di desa maupun kota. Tanggapan pertama pemerintah pada krisis ini menunjukkan kesombongan atau minimnya kesadaran pada realita.

Reformasi diumumkan, tetapi proyek para keluarga juga keluarga senantiasa dilindungi. Perjanjian dengan IMF bulan Oktober 1997 memberikan akibat enam belas bank ditutup, namun 2 bank yang dipunyai keluarga Soeharto kembali dibuka. Kemudian, dimulai tarik urat diantara IMF dengan Soeharto yang menjadi konsumsi publik bertambah memperkuat pandangan para pengamat luar juga dalam negeri bahwasanya rezim ini telah sangat terbelit korupsi, nepotisme maupun inkompetensi. Saat pemerintah dianggap tidak bisa memulihkan perekonomian, kepercayaan masyarakat pada pemerintah maupun Soeharto menghilang juga. Fenomena berkurangnya kepercayaan pada pemerintah Soeharto sesungguhnya telah terciium sejak tahun menjelang krisis moneter. Kerusakan yang muncul pada beberapa kota, misalnya Tasikmalayan, Pekalongan, Banjarmasin, Situbondo, Rengasdengklok juga yang lain pada tahun sebelumnya serta menjelang pemilu bulan Mei 1997, adalah beberapa tanda menurunnya kepercayaan masyarakat pada pemerintahan maupun penguasa. Kerusakan tersebut adalah ekspresi gugatan masyarakat pada janji keadilan yang didengungkan saat tiap menjelang pemilu. Pemerintah senantiasa menjanjikan keadilan sosial ekonomi, namun yang dihadapinya merupakan ketimpangan sosial ekonomi. Penyimpangan masa Orba dilihat pula dalam upaya Soeharto untuk memerintah Indonesia. Demokratisasi di Indonesia di masa Orba masih belum dilaksanakan dengan utuh. Ditinjau berdasarkan tatanan pemerintah, penyelenggaraan demokrasi pancasila belum berlangsung secara resmi. Pemusatan kekuasaan tersebut mencakup bidang ekonomi, hukum, sosial budaya, dan politik.

Sejarah perkembangan kelompok intelektual di Indonesia, terkhusus mahasiswa, bukan hanya berkuat terhadap masalah akademis saja. Beberapa kejadian penting ikut menyertakan mahasiswa untuk aktor penggerak. Hal tersebut tentu ada sebabnya, (Lipset & Altbach, 1969) menyatakan bahwasanya mahasiswa mempunyai tendensi aktif dalam memberi respon pada trend politik dan terlibat untuk melaksanakan perubahan daripada populasi kebanyakan. Sesuai dengan hal itu Lewis Coser seperti dikutip (Budiman, 1978) menyatakan pula bahwasanya kelompok intelektual merupakan mereka yang tidak pernah merasa puas. Hal itu artinya bahwasanya mahasiswa mempunyai kecenderungan agar senantiasa mempertanyakan dan juga mengejar kebenaran. Berdasarkan negara berkembang mahasiswa secara spesifik memiliki posisi juga peran yang esensial karena mereka merupakan mahasiswa sebagai kelompok elit yang pertama kalinya diperkenalkan dalam kelompok intelektual khususnya mahasiswa.

Dengan mempunyai sejumlah kelebihan dan kecenderungan daripada sebagian banyak masyarakat, mahasiswa kemudian ikut pada beberapa macam kegiatan dan gerakan politik. (Curran & Renzetti, 1990) menyatakan bahwasanya mahasiswa mempunyai sejarah panjang didalam dunia aktivisme menjadi kelompok politik penekan. Lipset yang selanjutnya dikutip Philip Burgess

(Hofstetter, 1971) menyatakan pula bahwasanya ada sejumlah alasan mengapa timbul pembangkangan oleh kelompok intelektual. Sebagian diantaranya adalah munculnya masalah institusional yang spesifik misalnya ketidakmampuan administrasi, masalah sosial politik yang luas misalnya rasisme domestik juga perang, maupun penyebab generasi contohnya pemanfaatan teknologi pada kalangan pelajar. Maka, Edward Shill dalam (Akbar, 2016) yang mengelompokkan mahasiswa ke dalam kelompok intelektual dengan kepemilikan karakteristik khas terhadap tanggung jawab sosial dan fungsinya, menyatakan ada beberapa peranan kaum intelektual antara lain ikut membangun dan menyediakan kerangka nasional antara bangsa, membina kebersamaan juga keberdayaan, menyebarkan nilai kebudayaan yang tinggi, memberikan pengaruh pada proses perubahan sosial.

Negara Indonesia mengakui demokrasi menjadi suatu sistem ideal untuk melaksanakan praktik kenegaraan. Sesuai pemaparan Friederich A. Hayek, demokrasi adalah alat guna mewujudkan tujuan dan juga suatu sistem dalam memberi kemerdekaan individual dan perlindungan internal (Mufti, 2013). Berdasarkan konteks Indonesia di masa Orba, demokrasi yang dilaksanakan merupakan prinsip demokrasi Pancasila. Tetapi berdasarkan pelaksanaan Pancasila diberikan tafsir tunggal oleh pemerintah dan lebih sering dipergunakan dalam melakukan penegakan stabilitas nasional. Atas nama menjaga stabilitas nasional, masyarakat dibatasi guna terlibat dalam partai politik, namun lebih banyak diarahkan ke Golkar. Gerakan reformasi yang ada di tahun 1998 bisa dikelompokkan menjadi suatu gerakan sosial. Gerakan sosial adalah aksi kolektif yang dilaksanakan sekumpulan individu untuk memperjuangkan kepentingan yang berhubungan dengan isu politik didalam masyarakat (Sukmana, 2016).

## **B. Saran**

Tulisan hanya memiliki sifat pendahuluan. Maka harus disempurnakan oleh seluruh pihak yang terkait dengan bidang akademik. Begitu juga penyempurnaan melalui semua aspek harus dilaksanakan untuk menyempurnakan penulisan ini.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Dalam penulisan artikel ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari peneliti sendiri. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan artikel, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, I. (2016). *Demokrasi Dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial)*.
- Ali, F. (1985). *Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara*.
- Aminah, S. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Kencana
- Aribowo. (2020). *Peta Teori Gerakan Sosial*.
- Bacon. Ali, F. (1985). *Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara*. Burgess, P. M. & Hofstetter, C. R. (1971).
- Budiman, A. (1978). The Student Movement in Indonesia: A Study of the Relationship between Culture and Structure. *Asian Survey*, 18(6), 609-6
- Curran, D. J. and Renzetti, C. M. (1990). *Social Problems* (2nd ed). Massachusetts: Allyn and
- Djambak, S. (2008). Faktor Dominan Mempengaruhi Inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 23-38.
- Finaldin, Tom dan Sali, Iskandar. 2006. *Presiden RI dari Masa ke Masa*.
- Hakim, L. nul. (2016). Transformasi Ekonomi-Politik Jerman dan Regionalisasi Ekonomi di Asia. *Jurnal Kajian Wilayah*, 1(1), 79-100.
- Haqqi, H., & Wijayati, H. (2019). *Revolusi Industri 4.0 di Tengah Society 5.0: Sebuah Integrasi Ruang, Terobosan Teknologi, dan Transformasi Kehidupan di Era Disruptif*. Anak Hebat
- <https://online.ucpress.edu/as/article-abstract/18/6/609/21369/The-Student-Movement-in-Indonesia-A-Study-of-the?redirectedFrom=fulltext>Burgess, P. M. & Hofstetter, C. R. (1971). The "Student Movement": Ideology and Reality. *Midwest Journal of Political Science*, 15(4), 687-702. <https://www.jstor.org/stable/2110048>
- Indonesia. Denny JA. "Menjelaskan Gerakan Mahasiswa" dalam Kompas. Jakarta, 25 April 1998.
- Jakarta: Balai Pustaka. Pringgodigdo, AK. 1949. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*

- Jazimah, I. (2013). MALARI: Studi Gerakan Mahasiswa Masa Orde Baru. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 3(01). <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/IA/article/view/902>
- Jenjins, J. C. (1983). Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movements. *Annual Review of Sociology*, 9, 0527-553. [https://www.researchgate.net/publication/234838252\\_Resource\\_Mobilization\\_Theory\\_and\\_the\\_Study\\_of\\_Social\\_Movements](https://www.researchgate.net/publication/234838252_Resource_Mobilization_Theory_and_the_Study_of_Social_Movements)Klandermans, B. (1997).
- Nugroho Notosusanto. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*. Surabaya: Airlangga University Press.
- The Social Psychology of Protest. Oxford: Blackwell.Lipset, S. M. (1968). Student and Politics in Comparative Perspective. *Daedalus, Students and Politics*, 97(1), 1-20. [https://www.jstor.org/Kedaulatan\\_Pasca\\_Revolution\\_Perancis\\_Terhadap\\_Hukum\\_Internasional](https://www.jstor.org/Kedaulatan_Pasca_Revolution_Perancis_Terhadap_Hukum_Internasional). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 222-235.